

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS IIB MAJENE DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**DHARMAWANGSA
NIM : 10200114105**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dharmawangsa
Nim : 10200114105
Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 20 Januari 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Bumi Zarindah, Pattalassang-Gowa.
Judul : **Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara
Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 08 Maret 2019

Penyusun

DHARMAWANGSA

NIM : 10200114105

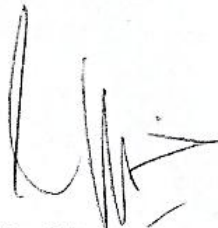
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **DHARMAWANGSA**, NIM: **10200114105**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 7 Februari 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Usman, M. Ag

Nip. 19580901 199102 1 001

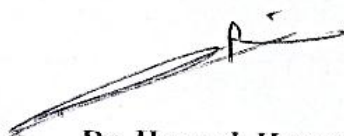
Pembimbing II



Dr. Kurniati, M. Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

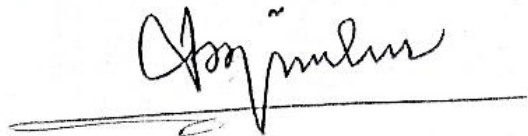
Penguji I



Dr. Hamzah Hasan, M. Hi

NIP.19631231 199302 1 003

Penguji II



Abd. Rahman Kanang, M.Pd, PhD

NIP.19731231 200501 1 034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh saudara **Dharmawangsa**, NIM : 10200114105, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 04 Maret 2019 M
27 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamzah Hasan, M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, S.Ag, M.HI	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakutas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIM 19821016 199003 1 003



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat penyusun rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Salam dan Taslim tetap tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat di muka bumi.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada kedua orang tua saya **Ayahanda Muh. Arif dan Ibunda Rustia** sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putranya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Kurniati, M.HI, selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama masa studi.
5. Bapak Prof. Dr. Usman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.HI dan Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D, yang masing-masing selaku Dosen penguji I dan penguji II yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak I Wayan Nurasta Wibawa, A. Md.IP,S. Sos, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene yang telah memberi informasi dan data yang diperlukan saat melakukan penelitian serta berbagi ilmu sekaligus memberikan nasehat kepada penulis.
9. Bapak Mesran, S.Pd, Bapak Muh. Arham, S.Ag dan Bapak Rifai yang masing-masing selaku Kepala Subseksi Kesatuan Keamanan, Kepala Pelayanan Tahanan dan Kepala Pengelolaan, yang memberikan informasi yang dibutuhkan dan seluruh pegawai serta staf Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene yang sangat ramah.
10. Untuk saudara saya Fitriani dan Munandar yang selalu siap membantu saya dan selalu mendorong saya untuk tetap semangat dan keponakan saya yang terkadang membuat saya rindu.

11. Seluruh keluarga saya, Abd. Razak, Saoda, Ruslamia, Rusmiati, Rusman, Nila Isnaina, Basri, Muh. Lukman dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu baik materi maupun non materi.
12. Sahabat Saya, Teman yang selalu membantu dan mendukung saya sejak masa SMP hingga sekarang dan menjadi teman selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Irwan, Muh. Fitrah Haikal, Nuramaliah Wahab, Harsani, Andi Adilla, Zukmadinah, Nurwana dan Dewi Syafitri.
13. Armidayanti yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian serta memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
14. M. Syukur, Akbar Tamrin dan Andi Akmal, teman kelas yang menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan serta menjadi kawan selama merantau.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terkhusus HPK C, Andi Suharto, Muh. Yahya, Wawang Setiawan, Andi Erwin, Annisa Rezki, Rezki Arsita, Puput Anugrah, Reski Sri Rahayu, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
16. Teman PPL, Riska Ayu Ningsih, Surniati, Nirgahayu, Syahratul Awalia, Aswin dan Aswan berkat dukungan dan hiburannya serta doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-Teman seperjuangan selama KKN angkatan 58 Kabupaten Luwu, Kecamatan Ponrang dan terkhusus kepada teman-teman posko Desa Tumale, Dwi Saputra Mario Muhammad, Ghassan Zakiri, Raden Ulandari Tamrin, Aryanti Rasyid, Hartina dan Lisa.

18. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya.

Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat beraryi.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Samata, 08 Maret 2019

Penyusun

DHARMAWANGSA



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Puataka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-46
A. Hukum Islam	12
B. Pidana	20
C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	28
D. Hak Narapidana	34
E. Pembinaan Narapidana di Indonesia	36
F. Pandangan Hukum Islam tentang Pembinaan Narapidana.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	47-51
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	50
G. Pengujian Keabsahan Data.....	50

BAB IV PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN	
NEGARA KLAS IIB MAJENE	52-74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara	
Klas IIB Majene	59
C. Pandangan Narapidana tentang Pembinaan	70
BAB V PENUTUP.....	75-76
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77-78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	A lif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B a	B	Be
ت	T a	T	Te
ث	S a	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Ji m	J	Je
ح	H a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	K ha	Kh	ka dan ha
د	D al	D	De
ذ	Z al	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	R a	R	Er
ز	Z	Z	Zet

	ai		
س	S in	S	Es
ش	S yin	Sy	es dan ye
ص	S ad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	D ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘a in	‘	apostrof terbalik
غ	G ain	G	Ge
ف	F a	F	Ef
ق	Q af	Q	Qi
ك	K af	K	Ka
ل	L am	L	El
م	M im	M	Em

ن	N un	N	En
و	W au	W	We
ه	H a	H	Ha
ء	H amzah	,	Apostof
ي	Y a	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>damamah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ			

	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
نَو	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepadanya *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Dharmawangsa

Nim : 10200114105

**Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam**

Skripsi ini membahas mengenai Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Adapun pokok masalah adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene” yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: 1). Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene? 2). Bagaimana pandangan Narapidana terhadap Pelaksanaan pembinaan?

Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research Kualitatif* atau penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar’i untuk melihat kejadian yang terjadi dalam pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene. Hasil penelitian ini diperoleh dari data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak pegawai RUTAN, Narapidana dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang diterapkan untuk Narapidana adalah berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 2) Pandangan Narapidana bahwa kegiatan dan pola pembinaan yang dilakukan pihak RUTAN sangat baik dan menarik karena pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian dan keterampilan kerja. Pembinaan yang diberikan antara lain membaca Al-Quran, membuat kerajinan tangan, olahraga dan kegiatan pramuka.

Implikasi dari penelitian adalah: 1). Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberi dukungan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada baik dari sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan lebih baik. 2). Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengingat semakin meningkatnya angka kejahatan di wilayah Kabupaten Majene, diharapkan dapat memberikan lahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di daerah Majene dikarenakan RUTAN Klas IIB Majene sudah over kapasitas. Dan seharusnya Narapidana dibina dalam LAPAS agar lebih efektif pembinaan yang dilakukan. 3). Selanjutnya penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada mantan Narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan mau menerima kembali mantan Narapidana serta memberikan kesempatan bagi mantan Narapidana untuk menunjukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan melakukan kesalahan lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu ketertiban, keamanan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan lain sebagainya.

Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses (*process*) untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu pada akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan keseimbangan-keseimbangan baru.¹

Begitu pun dengan hukum pidana, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Menurut Bambang Poernomo bahwa hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya

¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 36-37.

²Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 129.

tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.³

Perkembangan tentang penjatuhan pidana sekarang ini mengalami ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada, karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam prakteknya tidak pernah bisa dicapai, disebabkan para penegak hukum selalu terjadi pergolakan antara keadilan dan kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum yang tidak pernah bertemu dalam tataran ideal. Sehingga pemidanaan hanya merupakan cerminan dari nilai-nilai dan sebagai alasan untuk memenuhi hasrat pembalasan semata.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu. Keberadaan sanksi itu juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan adalah pidana penjara. Deskripsi mengenai praktik pemenjaraan secara objektif akan mengikutsertakan banyak aspek. Mulai dari bangunan yang di desain khusus, hukum atau regulasi yang mengatur fungsi dari penjara, bekerjanya birokrasi dan petugas, hingga perlakuan (rehabilitasi/reformasi). Selain itu, narapidana juga

³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 129.

membentuk pola kehidupan yang khas, berbeda dari kehidupan masyarakat di luar penjara. Dalam studi-studi sosiologis terhadap kehidupan penjara, pola kehidupan yang khas tersebut dimaknai sebagai budaya penjara. Pola interaksi antar penghuni serta struktur masyarakat yang terbentuk juga menjadi subjek tersendiri yang diperhatikan saat mendeskripsikan praktik pemenjaraan. Termasuk penyimpangan atau pelanggaran disiplin oleh otoritas, pola pemenuhan kebutuhan biologis, kekerasan antar narapidana, hingga peredaran narkoba, perjudian dan senjata.⁴

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang manusiawi. Maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang timbul dengan penerapan pidana penjara tersebut.

Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakekat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.⁵ Secara kemanusiaan, pemidanaan adalah bagian dari sistem peradilan

⁴Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 88.

⁵M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 80.

pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat serta negara, dengan bentuk penjatuhan pidana oleh hakim. Sekalipun telah diadakan upaya-upaya pembaruan dan perbaikan atas peraturan dan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, namun pada kenyataannya tetap saja keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan membayangi pembedaan.

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan dan dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dahulu, LAPAS disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁶

Sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan cara mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 226.

Pemasyarakatan dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Pasca munculnya pemasyarakatan pada tahun 1964, diperlukan waktu lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang Pemasyarakatan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana pemenjaraan di Indonesia masih menjadikan reglemen penjara sebagai pedoman. Hal ini di satu sisi tidak mengundang masalah karena secara prinsip telah ada komitmen besar untuk Pemasyarakatan yang jauh berbeda dengan prinsip pemenjaraan. Namun di sisi lain, lamanya rentang waktu untuk dibuatnya Undang-Undang khusus tentang Pemasyarakatan memperlihatkan lemahnya perhatian proses politik, di legislatif dan eksekutif pada masa itu.

Perkembangan lainnya pasca munculnya pemasyarakatan yang juga penting nilainya adalah difungsikannya unit-unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Seiring dengan munculnya pemasyarakatan pada tahun 1964, tugas besar yang ingin diemban adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Rumah tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan yang memanusiakan manusia, serta Balai Pemasyarakatan yang mengupayakan pertimbangan-pertimbangan proporsional bagi anak yang berhadapan dengan hukum di muka pengadilan.

Selain mencatat sejumlah kemajuan, semenjak tahun 1980-an, Pemasyarakatan mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik

masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah organisasional. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah semakin rendahnya kemampuan daya tampung lembaga pemasyarakatan, pelarian, kerusuhan, kekerasan, dan rendahnya kemampuan dalam memenuhi hak-hak narapidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang **“Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Majene. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene.

2. Deskripsi Fokus

Agar pembaca nantinya lebih memahami secara jelas masalah yang dimaksud untuk menghindari perbedaan persepsi, maka Penulis memberikan batasan pengertian yang dianggap perlu dalam judul diatas.

- a. Tinjauan adalah memahami dengan cermat atau memeriksa suatu pandangan atau pendapat.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁷

⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 211.

- c. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.
- d. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Tinjauan	Tinjauan adalah memahami dengan cermat atau memeriksa suatu pandangan atau pendapat.
Hukum Islam	Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan
Pembinaan	Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana
Narapidana	Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan skripsi ini yaitu “ Bagaimana Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene” yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene?
2. Bagaimana pandangan Narapidana terhadap Pelaksanaan Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut :

M. Ali Zaidan dalam bukunya “Menuju Pembaruan Hukum Pidana”. Dalam buku ini membahas aspek sanksi dalam hukum pidana, yakni pidana perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi pada suatu tempat berdasarkan kehendaknya sendiri. Dalam buku ini tidak dijelaskan bagaimana tujuan pemidanaan itu. Sedangkan dalam skripsi ini dijelaskan masalah tujuan pemidanaan dan pidana penjara sebagai pidana utama yang diterapkan di Indonesia. Pidana penjara kemudian dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya “Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah”. Dalam buku ini membahas masalah sumber-sumber hukum

pidana Islam yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Selain itu, juga dijelaskan masalah konsep pemidanaan dalam Islam. Hal ini sangat relevan dengan skripsi yang akan penulis bahas.

M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - Ide Dasar Double Track System & Implementasinya”. Dalam buku ini dijelaskan hubungan penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan serta perspektif filsafat tentang pemidanaan. Dalam buku ini banyak membahas masalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sesuai dengan skripsi ini yang akan membahas masalah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai penerapan dari sanksi pidana dan tindakan pidana.

Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana - Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahan di Indonesia”. Dalam bukunya membahas proses hukum acara pidana, khususnya membahas masalah perlindungan Hak Asasi Manusia sejak seseorang dilakukan penahanan sampai pada proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun buku ini tidak menjelaskan tujuan pemasyarakatan. Sedangkan dalam skripsi ini diuraikan tentang tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno dalam bukunya “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”. Dalam bukunya membahas masalah efektivitas pidana penjara. Efektivitas pidana penjara bisa dilihat dari beberapa aspek yakni, efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Suatu pidana dapat dikatakan efektif apabila dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Selanjutnya efektivitas pidana penjara ditinjau dari aspek perbaikan pelaku. Salah satu tolak ukur dari aspek perbaikan pelaku adalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap terpidana. Tapi dalam buku ini tidak dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pembinaan para terpidana selama menjalani masa tahanan di

LAPAS atau RUTAN. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembinaan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Nur Khalisah Naisy dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam skripsi ini membahas tentang pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Proses pembinaan warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan mengacu kepada UUD 1945 pasal 28, 28A-28J, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini yakni, dalam skripsi Nur Khalisah Naisy fokus pada pola pembinaan warga binaan sedangkan dalam skripsi ini akan berfokus pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana perspektif Hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene.
2. Untuk mengetahui pandangan Narapidana terhadap Pelaksanaan Pembinaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teori dan pengetahuan umum tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Indonesia, khususnya di daerah Majene.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara terperinci, hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Salah satu syarat bagi Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.
- c. Bagi Narapidana, agar dapat memahami tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana khususnya di Indonesia. Dengan memahami hal ini diharapkan mereka dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran tertentu selama menjalani masa pembinaan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam*

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam adalah merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Kemudian Mardani menjelaskan, bahwa dalam literatur hukum dalam Islam maupun dalam Al-Quran tidak ditemukan lafadz hukum Islam. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dan literatur Barat.⁸

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintakan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.⁹

⁸Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 307.

⁹<http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-mini-b-bookmark&oq=Pengertian+Hukum+Islam+dan+Sum&aqs=mobile-gws-lite.0.015&q=pengertian+hukum+islam+dan+sumber+hukum+islam> (Diakses pada Oktober 2018).

Adapun pengertian hukum Islam dalam makna fiqih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁰

Di dalam hukum Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku sebagai hukum positif, hal ini dikarenakan banyak pedagang dari timur datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga membina dan membangun keluarga dengan orang asli Indonesia sehingga lahirlah keturunan. Selain itu, banyak orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke timur tengah untuk mempelajari agama Islam kemudian kembali membawa ajaran tersebut. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia selain sistem hukum barat. Kedudukan hukum Islam di Indonesia tidak secara penuh dilakukan melainkan hanya sebatas perkara muamalah seperti perkawinan, zakat, waris, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh masa kolonial dimana Belanda menjajah kekayaan nusantara, mulai berpikir untuk menjajah budaya dan tradisi dengan memberlakukan hukum positif negara Belanda ke negara Indonesia sehingga menggeser hukum Islam didalam masyarakat.¹¹

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Ada empat sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Urutan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Al-Quran berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syariat Islam, As-

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 211.

¹¹<http://isikepalakachfi.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html?m=1> (Diakses pada Oktober 2018).

Sunnah sebagai sumber yang kedua, Ijma atau konsensus sebagai sumber ketiga dan Qiyas atau analogi sebagai sumber keempat.¹²

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber yang utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, dan divisualkan dalam bentuk huruf Arab kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makkiyah dan sebagian ayat yang diturunkan di kota Madinah atau ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran terdiri atas 114 surah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas dan terbagi dalam tiga puluh juz. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam, sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah banyaknya ayat Al-Quran yang menetapkan demikian.¹³ Allah berfirman dalam QS Al-Isra/17: 9 yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama bagi ketentuan hukum Islam :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.¹⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Menurut ulama ushul fiqh, ayat ini dapat dimaknai

¹²Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 56.

¹³Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 115.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 283.

bahwa Al-Quran menjadi patokan atau kaidah dan tatanan hukum untuk manusia dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut peraturan atau hukum-hukum Allah SWT. Menurut Moenawar Cholil, Al-Quran adalah landasan amaliah manusia yang paling sempurna dengan penjelasan yang sempurna dari Rasulullah SAW yang tidak pernah menjelaskannya dengan hawa nafsu, kecuali atas dasar wahyu dari Allah SWT.¹⁵

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau hadis adalah sumber kedua dimana ajaran-ajaran Islam diambil. As-Sunnah secara harfiah berarti suatu sarana, suatu jalan, aturan, cara untuk berbuat atau cara hidup. As-Sunnah juga berarti metode atau contoh dalam arti aslinya, As-Sunnah menunjuk pada perbuatan-perbuatan dan hadis perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad SAW tetapi dalam pelaksanaan, keduanya mencakup satu hal yang sama dan diterapkan bagi praktik, perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW.¹⁶

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, didasarkan pada ayat-ayat Allah dalam QS An-Nisa/4:59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

¹⁵Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 117-118.

¹⁶Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 62.

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁷

Dalam ayat lain dijelaskan dalam QS Al-Maidah/5: 92.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى
رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya :

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.¹⁸

Ayat diatas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Siapa pun yang taat kepada Rasulullah berarti telah taat kepada Allah. Secara logika, ketaatan kepada Allah adalah mengikuti semua perintah-Nya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintah-Nya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran. Dengan demikian, ketaatan kepada Rasulullah SAW berarti mengikuti sunnah-sunnahnya. Semua yang menjadi sunnah adalah personifikasi perilaku Rasulullah SAW yang terjaga dan terpelihara dari berbagai kesalahan.

Berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat dari wujud ajaran Islam, Rasulullah SAW merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekedar membawa risalah ilahiah dan penyampai ajaran Islam yang ada di dalamnya. Beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, memerinci, atau memberi contoh

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 87.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 123.

pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui Al-Quran. Oleh karena itu, kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan syariat sekaligus sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah Al-Quran disebut dengan sunnah atau hadis.¹⁹

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum ketiga dalam hukum Islam yang berarti suatu konsensus dari banyak fukaha Muslim pada suatu masa mengenai suatu pertanyaan hukum. Suatu definisi lain dikemukakan Audah yang menyebut bahwa ijma berarti persetujuan dari semua fukaha Islam terhadap suatu ketentuan syariah pada setiap waktu setelah Rasulullah SAW tiada. Audah lebih jauh menjelaskan daya mengikat dari ijma ini, yaitu jika seluruh fukaha Islam setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada satu dan waktu yang sama atau berbeda, persetujuan yang dicapai akan mengikat untuk semua mukmin dan diperlakukan sebagai bukti final dan positif dari ketentuan itu.²⁰

Ijma merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk dan mengungkapkan kompleks kepercayaan dan praktik kaum muslim. Pada waktu yang sama, ijma juga merupakan faktor yang paling membingungkan dalam batasan-batasan formasinya. Ijma adalah suatu organis, dan seperti suatu organisme yang berfungsi sekaligus tumbuh pada setiap saat. Ijma memiliki kekuatan dan validitas fungsional yang tinggi, dalam arti bersifat “final”. Akan tetapi, pada saat yang sama juga mencipta, mengasimilasi, memodifikasi, dan menolak unsur-unsur dari luar dirinya. Itulah sebabnya, pembentukannya tidak

¹⁹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 135.

²⁰Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 64.

dapat dilembagakan dalam bentuk apapun. Kelompok ulama dan ahli hukum yang tumbuh dengan cepat pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dan ke-2 Hijriah atau 8 Masehi dan masa-masa selanjutnya dapat membahas dan merumuskan hasil-hasil ijtihad mereka yang sangat berpengaruh, terutama bila mereka bersesuaian pendapat (atau lebih tepatnya kebetulan bersesuaian dan ini disebut ijma para ulama). Akan tetapi, pembentukan ijma tidak dapat dilakukan dalam ruang diskusi. Pembentukan ijma lebih condong pada opini publik yang cerdas, yang dalam pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya, perumusan aliran-aliran merupakan faktor paling berpengaruh terhadap keberadaan ijma yang dimaksudkan. Kewajiban umat Islam mengikuti ijma karena keputusan yang dihasilkan dari produk ijma tidak dilakukan semena-mena, mempunyai sandaran, dan berpijak pada sumber-sumber terdahulu. Ijma harus ditegakkan di atas aturan-aturan yang umum serta roh syariat. Oleh karena itu, meskipun pendapat tersebut keluar dari berbagai negeri dan bangsa yang berbeda, kebulatan pendapat tersebut menunjukkan loyalitas ulama terhadap kebenaran syariat.²¹

d. Qiyas

Apabila menghadapi masalah kontemporer tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah Rasul, ataupun ijma, cara menyelesaikannya dengan mengikuti ketentuan yang telah ada (telah diketahui) hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang telah ada hukumnya dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara analogis. Cara semacam ini terminologi fiqh disebut qiyas. Banyak ulama menganggapnya sebagai sumber hukum yang keempat. Qiyas berasal dari kata *qasa*, *yaqisu*, *qaisan*, artinya mengukur dan ukuran. Kata *qiyas* diartikan ukuran

²¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 142.

sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyaman sesuatu dengan yang sejenis.²²

Menurut Shibab al-Din al-Khurafi, seorang ahli metode-metode dalam fikih, *qiyas* adalah menerapkan dapat dipakainya suatu ketentuan dalam satu kasus terhadap kasus lain atas dasar kesamaan dalam hal sifat dengan ketentuan pertama tadi. Sementara itu menurut Abdul Qadir Audah, *qiyas* berarti menghubungkan suatu problem yang tidak diterapkan dalam syariah dengan suatu problem yang sudah ada ketentuannya atas dasar secara umum sebab dari kedua problem itu sama.²³

Syarat utama dalam pendekatan analogi atau *qiyas* adalah adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif, karena dari kasus khusus ditarik pada kasus yang sifatnya umum. Dalam *qiyas* ada proses generalisasi sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang, mulai pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.²⁴

Illat adalah sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya illat hukum, proses mempersamakan ketentuan hukum dilakukan. Oleh karena itu, digunakan logika induktif, bukan deduktif. Karena sifat hukum yang melekat pada ashl merupakan hakikat hukum ashl yang secara ontologis hanya berlaku untuk hakikat dirinya sendiri dan berlaku khusus, dengan pendekatan *qiyas*, hukum ashl dengan illat-nya diambil alih untuk masalah yang berbeda, tetapi dipandang memiliki illat

²²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 143.

²³Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 65.

²⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 148.

yang sama, dan terjadilah upaya mempersamakan hukum. Cara kerja logika demikian merupakan proses generalisasi hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum untuk ashl tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi termasuk untuk masalah lain (cabang) yang memerlukan ketentuan hukum.²⁵

B. Pidanaaan

1. Pengertian Pidanaaan

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*).²⁶

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dipidana. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atas akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh negara atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dalam hal ini hakim dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10

²⁵Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 149.

²⁶M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4.

KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi penegakan hukum pidana.²⁷

Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentuk undang-undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancamkan kepada pelanggar.²⁸

Namun demikian, dalam prakteknya pembentuk undang-undang seakan berhadapan dengan keadaan tanpa alternatif, sehingga pilihan selalu dijatuhkan kepada sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Soedarto, dalam kedua hal tersebut terdapat hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan untuk dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 24.

²⁸M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.11.

menyangkut jenis sanksi yang akan diancamkan maupun yang akan dijatuhkan, merupakan wilayah penegakan hukum.²⁹

Dari sini terlihat bahwa sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan merupakan keadaan yang tidak dapat dielakkan. Tidak ada alternatif lain, kepada si pelaku harus dijatuhi pidana yang berat berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana ditentukan KUHP. Justru penggunaan cara lain melalui hukum perdata seperti ganti kerugian atau hukum administrasi negara berupa pencabutan izin atau pemecatan merupakan ketidakadilan karena antara perbuatan dan sanksi tidak terdapat kesebandingan.

2. Tujuan Pidana

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang. Tujuan pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pidana, yaitu teori absolut (*vergelding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*). Teori tersebut mengkaji tentang alasan pembeda penjatihan pidana.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa

²⁹Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1981), h. 106

tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatukannya pidana.³⁰

Karl O. Christiansen mengemukakan ciri pokok atau karakteristik teori absolut yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbalan agar tercipta ketertiban hukum. Dasar pijakan teori absolut dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal kepada penjahat, karena itu teori ini juga disebut pembalasan. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.³¹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doel Theorien*)

Teori ini mengemukakan bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana

³⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 24

³¹Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009), h. 70

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³² Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya.

Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhannya bukan hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya.³³ Teori relatif melihat pada sifat berbahaya pribadi si pelaku kejahatan dan terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sama, karena itu dalam teori ini dikenal istilah prevensi khusus dan prevensi umum.

Toeri-teori relatif, baik teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus, tidak memandang penjatuhannya pidana sebagai suatu konsekuensi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu, melainkan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Teori prevensi menganggap bahwa kesalahan seseorang berada diluar perhatiannya. Pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Perbuatan manusia bukan menjadi dasar hukum atau alasan untuk menjatuhkan pidana, melainkan hanya dianggap sebagai keadaan yang menimbulkan pidana. Tindak pidana merupakan petunjuk tentang adanya keadaan bahaya, untuk itu negara harus melakukan reaksi berupa penjatuhannya pidana.

Karl O. Christiansen mengemukakan ciri pokok atau karakteristik teori relatif yaitu :

³²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 25.

³³Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009), h. 72.

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vernenggings Theorien*)

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai alat pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana yang sama. Menentukan titik temu dari kedua pandangan tersebut memerlukan formasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan. Untuk itu lahirlah sebuah teori gabungan yang menganggap pembalasan sebagai asas dalam hal tindak pidana dan pidana seharusnya juga melakukan perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan harus adanya prevensi, baik itu prevensi umum atau prevensi khusus.

Dalam konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Dalam

setiap tahap peradilan pidana perlu ada asas-asas tertentu yang diprioritaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori gabungan atau integratif mengutamakan perbedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk perbedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.³⁴

Dari sekian banyak pendapat para ahli hukum yang menganut teori gabungan atau integratif tentang tujuan pemidanaan, Muladi cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan atau pengimbangan.³⁵

Namun ditegaskan oleh Muladi bahwa ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

³⁴Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009), h. 76-77

³⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 28

- 1) Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan pelaku.
- 2) Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan (*to maintain social cohesien infact*). Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga membuat benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan masyarakat secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

Selain dikenal adanya teori pembalasan (retribution), teori pencegahan (deterrence), dan teori reformation (perbaikan), dalam hukum pidana Islam dikenal adanya afwun (pemaafan). Jika seseorang telah melakukan sebuah dosa atau kejahatan, maka orang tersebut masih bisa diberi ampunan dari pihak keluarga korban. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 178-179. yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولَى الْأَلْبَبِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³⁶

Salah satu perbedaan hukum Pidana Islam dengan hukum positif terlihat jelas pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan ini terletak pada dipertimbangkannya hak dari korban penganiayaan atau hak bagi keluarga pada kasus pembunuhan. Berbeda dengan hukum positif, tindak pidana pembunuhan merupakan sebuah permasalahan hukum publik sehingga hak sepenuhnya berada di tangan negara dalam hal ini diatur dalam undang-undang. Walaupun keluarga korban memaafkan seorang pelaku pembunuhan, tidak akan mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga hukuman tidak akan menjadi ringan atas adanya pemaafan dari pihak keluarga korban.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 27.

C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Pengertian Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum bernama Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang kini disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat “KEMEMKUMHAM”. Pemasyarakatan oleh Beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin baik dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Sistem pemasyarakatan dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³⁸

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.³⁹

Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa hubungan antara sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu mata rantai yang pada dasarnya tidaklah putus. Hubungan antara kedua sistem ini merupakan gambaran dari bagaimana hukum pidana bekerja antara norma-norma yang ditentukan di

³⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 228.

dalam aturan perundang-undangan. Pencapaian tujuan akhir dari politik hukum pidana tidak akan pernah tercapai tanpa adanya suatu kebijakan yang terpadu (integrated). Bukan hanya pada sistem peradilan pidana saja atau sistem pemasyarakatan secara terpisah, akan tetapi keterpaduan dua sistem ini sangat menentukan dalam pencapaian tujuan pemidanaan.⁴⁰

2. Tujuan Pemasyarakatan

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.⁴¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang di maksud dengan

⁴⁰Eva Achjani Zulha, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 95.

⁴¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 106

“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam dokumen cetak biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, Bab 2, disampaikan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan pemasyarakatan.⁴²

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjaraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

3. Asas-Asas Pemasyarakatan

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

⁴²Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 106

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴³

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah :

“Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

“Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki diri. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga atau rekreasi.⁴⁴

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Hak Narapidana

Manusia sebagai ciptaan makhluk Allah SWT yang mengembangkan tugas mengelola dan memelihara alam semesta sebagai khalifah di bumi dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri, oleh sang pencipta-Nya dianugerahi hak untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat serta menjamin keselamatan dirinya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Adapun hak-hak warga negara meliputi: jaminan atas hidup dan harta kekayaan, perlindungan kehormatan, kepribadian dan jaminan kehidupan pribadi, jaminan kebebasan pribadi, hak untung menentang tirani, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan ucapan hati nurani dan keyakinan, perlindungan terhadap sentimen-sentimen keagamaan, perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang, hak atas kebutuhan-kebutuhan hidup pokok, persamaan kedudukan di hadapan hukum, penguasa tidak

⁴⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 107.

kebal hukum, hak untuk menjauhi perbuatan dosa, hak ikut serta dalam urusan negara.⁴⁵

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁴⁶ Tak terkecuali seorang Warga Binaan Pemasyarakatan juga berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya walaupun dibatasi hak-hak tertentu karena telah melakukan sebuah kejahatan.

Adapun hak-hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 bahwa Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapat pembebasan bersyarat; dan

⁴⁵Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM – Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 15-16.

⁴⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A.

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadanya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Sistem pemasyarakatan mentitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.⁴⁸

E. *Pembinaan Narapidana di Indonesia*

Saat Narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun hilang kemerdekaannya, ada hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam praktik pembinaan Narapidana di Indonesia, seharusnya Narapidana dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Mengingat tidak semua Kota/Kabupaten memiliki LAPAS, maka Narapidana akan dibina di Rumah Tahanan Negara

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14.

⁴⁸Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

(RUTAN). RUTAN akan dialih fungsikan sebagai LAPAS untuk pembinaan Narapidana di setiap daerah yang tidak memiliki LAPAS dan begitupun sebaliknya jika tidak ada RUTAN, maka lapas akan difungsikan sebagai RUTAN.

Dalam sistem masyarakat, Narapidana, Anak Didik Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.⁴⁹

Mengenai pembinaan Narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yakni⁵⁰:

PASAL 2

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Masyarakat.

PASAL 3

Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;

⁴⁹Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

⁵⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

PASAL 6

1. Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
3. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

PASAL 7

1. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan; dan
 - c. Tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
5. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

PASAL 9

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

PASAL 10

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil litmas.
6. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

PASAL 11

1. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
2. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
3. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

F. Pandangan Hukum Islam tentang Pembinaan Narapidana

Di Indonesia hukuman penjara disebut dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan, dimana para Narapidana dibina agar dapat memperbaiki diri,

menyadari kesalahan agar tidak melakukan kejahatan lagi dan bisa bertobat atas tindakan yang dilakukan sebelumnya. Seseorang yang dianggap bertobat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya. Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan pengadministrasiannya agar dijalankan secara baik sehingga mendukung para Narapidana bertobat. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terdakwa sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.⁵¹

Dalam hukum pidana Islam, pidana penjara merupakan pidana yang tergolong dalam hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim. Hukuman ta'zir bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan kepada pelaku. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.⁵²

Para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara. Alasannya, di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada lembaga penjara dan keduanya hanya mengasingkan seseorang di suatu tempat. Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini tidaklah berarti bahwa pidana penjara tidak disyariatkan dalam hukum Islam. Sampai pada masa Umar bin Khattab, dimana penduduk semakin banyak dan kian menyebar luas sehingga

⁵¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta; Amzah, 2014), h. 154.

⁵²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 593-594.

muncul kebutuhan diadakannya pidana penjara⁵³. Berikut adalah dasar yang memperkuat dianjurkannya pidana penjara dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵⁴

Ayat diatas bisa menjadi dasar diadakannya pidana penjara. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menahan dan memenjarakan dalam rumah sehingga dapat diartikan pula sebagai pensyariatan diadakannya pidana penjara. Kemudian dasar dari Sunnah bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyariatkannya pidana penjara. Adapun dasar dari Ijma Sahabat tampak ketika Umar bin Khattab membeli rumah Syafwan bib Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara dan tidak satupun yang mengingkarinya ataupun protes.⁵⁵

⁵³<http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-islam.html?m=1> (Diakses Oktober 2018)

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 80.

⁵⁵<http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-islam.html?m=1> (Oktober 2018).

Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijeaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan antara lain, Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.⁵⁶

1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan Fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung pada pelaku dan jarimahnya.

⁵⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta; Amzah, 2016), h. 101.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta'zir. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara (ta'zir) ditentukan batasnya, sama dengan had dan itu berarti tidak adanya bedanya antara hukuman had dan ta'zir.

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu, hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, antara lain kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktekkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang

dan merayu istri atau anak perempuan orang lain sehingga ia keluar rumah lalu hancurlah rumah tangganya. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat bertujuan mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat.

Sedang praktek pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara senantiasa mengajurkan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi sifat-sifat buruk. Hal ini dilakukan dengan cara mengajarkan ilmu agama, mengajar mengaji, menganjurkan untuk shalat berjamaah dan berusaha untuk membantu warga sekitar.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran /3; 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁵⁷

Maksud Ayat ini, hendaklah ada segolongan yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya.⁵⁸ Agama Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan bahkan banyak sekali dalil yang menganjurkan agar manusia itu bersaing dalam setiap kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda :

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Sabiq, 2013), h. 63.

⁵⁸Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), h. 138.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه المسلم)

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudriy ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu tingkatan imam paling lemah” (HR.Muslim).⁵⁹

Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk mengubah kemungkaran. Kemungkaran tersebut harus diubah agar berganti menjadi kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Apabila keburukan merajalela, maka semua anggota masyarakat wajib bergerak untuk memperbaikinya dan menyingkirkan kerusakan.

Disinilah fungsi Pemasyarakatan untuk mengubah perilaku buruk Narapidana yang sebelumnya melakukan kejahatan supaya bisa bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan bukan cuma tugas dari pegawai LAPAS atau RUTAN saja, ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang baik dari sisi negara maupun agama.

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah

⁵⁹Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistha, Penerjemah Muhammas Rais, *Alwafi Hadist Arbain Imam Nawawi-Pokok-Pokok Ajaran Islam*, (Cet I; Depok: Fathan Prima Media, 2017), h. 345.

merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Sesungguhnya diantara peran-peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah saling menasehati, mengarahkan kepada kebaikan, kebenaran dan kesabaran.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research Kualitatif* (penelitian lapangan). Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realita sebagaimana yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.⁶⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Majene. Khususnya pada wilayah kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Majene. Pertimbangan Penulis memilih penelitian di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Majene, karena lembaga tersebut yang bertanggung jawab menangani tentang proses pembinaan Narapidana yang ada di Majene.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis dimana suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Sosiologis dimana suatu pendekatan yang melihat kaidah-kaidah yang terdapat pada penelitian ilmu sosiologi. Dalam penelitian ini mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Pendekatan Syar'i dimana suatu pendekatan yang melihat kaidah-kaidah yang terdapat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

⁶⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Majene. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan. Sumber datanya diambil dari informan yang terdiri dari Pegawai RUTAN yang berjumlah lima (5) orang, Narapidana yang berjumlah lima (5) orang dan masyarakat yang berjumlah lima (5) orang.

Tabel 1 Daftar Informan Wawancara

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Rutan	5 orang	1. I Wayan Nurasta Wibawa 2. Muh. Arham 3. Muh. Farid Saputra IK 4. Safwan 5. Yusrianto
2.	Narapidana	5 orang	1. Firdaus 2. Irham 3. Indra Didi Yudha 4. HR. Aswar Husain 5. Riswan
3.	Masyarakat	5 orang	1. Abd. Latif 2. Ridwan 3. Ahmad

			4. Suryadi 5. Muliati
	Jumlah Informan	15 orang	

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya tulis ilmiah terkait masalah yang dibahas.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file documenter, file recorder dan data lain yang relevan dengan penelitian.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁶¹

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penulisan ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan telah tersusun rapi dan ketat.⁶²

⁶¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 3; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 105.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 35; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 186.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah data yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah dokumen, pedoman observasi, dan wawancara. Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah, lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dijalankan dengan mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 91 Warga Binaan Pemasyarakatan dan 50 Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene. Lalu dilakukan penarikan sampel sebanyak 10 orang. Kemudian proses penarikannya dengan cara *simple random sampling design*, dengan cara pelaksanaannya yang sederhana dengan sistem acak.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh Peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



BAB IV
PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS
IIB MAJENE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. RUTAN Klas IIB Majene menyelenggarakan tugas-tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai gambaran umum bahwa Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja unit pelaksana teknis, juga memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tugas pokok.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene berada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang ke 33 di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Provinsi yang muda usianya namun tidak demikian dengan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene yang sudah lama berdiri. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene berlokasi di jalan Andi Tonra No. 13, Kabupaten Majene.

Adapun pembagian ruangan yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene antara lain :

- a. Ruang Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene
- b. Ruang Subseksi Satuan Pengamanan
- c. Ruang Subseksi Pelayanan Tahanan
- d. Ruang Subseksi Pengelolaan

- e. Ruang Aula
- f. Ruang kunjungan
- g. Blok penghuni yang terdiri dari 4 blok (kapasitas 98 orang)
- h. Tempat ibadah (Masjid)
- i. Ruang Poliklinik
- j. Perpustakaan
- k. Ruang dapur
- l. Bingker (ruang keterampilan kerja)
- m. Sarana Olahraga.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene

a. Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene adalah unsur Unit Pelaksanaan Teknis dengan tugas membantu Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat untuk melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan serta melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

b. Tugas

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bertugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan, meliputi :

- 1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.

- 2) Mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan
- 3) Memberikan bimbingan bagi tahanan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan pelayanan tahanan
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- 3) Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
- 4) Melakukan urusan tata usaha

d. Visi dan Misi

Hampir setiap instansi mempunyai sebuah visi dan misi. Para pengelola instansi biasanya akan menggagas impian atau tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan utama, perlu juga adanya gagasan-gagasan mengenai target-target baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk tulisan supaya seleruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah instansi terkait.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dalam menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, mempunyai sebuah visi dan misi yang ingin dicapai. Berikut adalah visi dan misi dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene :

VISI

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi yang mampu mewujudkan tertib masyarakatan

MISI

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

Dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene di atas, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Upaya pemberdayaan segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun anggaran yang tersedia secara tepat guna dan tepat sasaran.

3. Data Pegawai dan Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene

a. Data Pegawai

Berikut adalah data pegawai yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene :

Tabel 2 Data Pegawai

No.	Nama	Jabatan
1.	I Wayan Nurasta Wibawa, A. Amd. IP, S.Sos , M.Si	Kepala Rutan Majene
2.	Mesran, S.Pd	Kepala Kesatuan Keamanan
3.	Rifai	Kepala Pengelolaan
4.	Muhammad Arham, S.Ag	Kepala Pelayanan Tahanan
5.	Aspar, S.Pdi	Pengelola Kepribadian
6.	Nurhaida Kapa, S.Hi	Pengelola Data Kepegawaian
7.	Martani	Pengadministrasi Layanan Kunjungan
8.	Muliadi	Komandan Jaga
9.	Muh. Syahib	Komandan Jaga
10.	Nardin	Pengelola Kemandirian
11.	Usman Tager	Pengelola Kemandirian
12.	Basri Bakri	Komandan Jaga
13.	Dewi Mashita Gela, S.Kom	Pengelola Data Kepegawaian
14.	Munardi Sakti, S.Pdi	Komandan Jaga
15.	Nuhaider Bakri, SP	Petugas/Anggota Jaga
16.	M. Ichsanulhaq, SE	Petugas/Anggota Jaga
17.	Sirajuddin Nur	Petugas/Anggota Jaga
18.	Munafri	Petugas/Anggota Jaga
19.	Ahmad Gazali, Amk	Pengelola Data Kesehatan
20.	Muhammad Thaha, A. Md. Kom	Pengelola Keuangan
21.	Muh. Farid Saputra IK., A.Md. Kep	Penelaah Status WBP
22.	Akram	Petugas/Anggota Jaga

23.	Abdurrochiem Sholeh	Pengelola BMN
24.	Sukriadi	Petugas/Anggota Jaga
25.	Sahabuddin	Pengawal Napi/Tahanan
26.	Hamka Idrus	Petugas/Anggota Jaga
27.	Burhanuddin	Petugas/Anggota Jaga
28.	Asrullah	Petugas/Anggota Jaga
29.	Nurjannah	Pengadministrasi Keuangan
30.	Wahyudi, A.Md.P	Penelaah Status WBP
31.	Tonni Brandons, A. Md.P	Penelaah Status WBP
32.	Ilham	Bendahara Satker
33.	Rahmat	Pengawal Napi/Tahanan
34.	Muhammad Sutrisno	Pengawal Napi/Tahanan
35.	Hajrah	Pengawal Napi/Tahanan
36.	Yusrianto	Pengelola Kemandirian
37.	Debbi	Pengelola Data Kepegawaian
38.	Muh. Atthar	Petugas/Anggota Jaga
39.	Fewaris Effendy	Pengelola SDP
40.	Safwan	Pengelola Kepribadian
41.	Nurul Utami Hardianti T.	Pengelola Database
42.	M. Sadli	Bendahara Penerima
43.	Misbahuddin	Petugas/Anggota Jaga
44.	Muh. Nashrulhaq Mahbub	Penjaga Tahanan
45.	Jasman	Penjaga Tahanan
46.	Muh. Zulham Said	Penjaga Tahanan
47.	Muh. Muaffiqfarunnur	Penjaga Tahanan
48.	Ulva Agriani	Penjaga Tahanan
49.	Zulkifli	Penjaga Tahanan
50.	Wahyudi	Pengawal Napi/Tahanan

b. Data Penghuni

Berikut adalah data penghuni Narapidana dan Tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene :

Tabel 3 Data Narapidana

Narapidana	18 TH kebawah		18 TH keatas		Jumlah		Total	Keterangan
	L	W	L	W	L	W	L/W	
Napi B.I	-	-	74	8	74	8	82	Narapidana = 91 orang
Napi B.II a	-	1	4	1	4	2	6	
Napi B.II b	-	-	-	-	-	-	-	
Napi B.III	-	-	-	-	-	-	-	
Napi B.III S	-	-	2	1	2	1	3	
Jumlah	-	1	80	10	80	11	91	

Keterangan :

Napi B.I : Pidana 1 tahun keatas

Napi B.II a : Pidana 1 tahun kebawah

Napi B.II b : Pidana 3 bulan kebawah

Napi B.III : Pidana kurungan termasuk pidana pengganti denda

Napi B.III S : Narapidana yang menjalani Subsidiar

Tabel 4 Data Tahanan

Tahanan	18 TH kebawah		18 TH keatas		Jumlah		Total	Keterangan
	L	W	L	W	L	W	L/W	
TAH A.I	-	-	-	-	-	-	-	Tahanan = 50 orang
TAH A.II	1	-	10	-	11	-	11	

TAH A.III	-	-	33	2	33	2	35	
TAH. IV	-	-	4	-	4	-	4	
TAH A.V	-	-	-	-	-	-		
Jumlah	1	-	47	2	48	2	50	

Keterangan :

TAH A.I : Tahanan Kepolisian

TAH A.II : Tahanan Kejaksaan

TAH A.III : Tahanan Pengadilan

TAH A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi

TAH A.V : Tahanan Mahkamah Agung

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB

Majene

Adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di dalam RUTAN tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar para Narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS atau RUTAN bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dimulai dari masa pengamatan dan pengenalan lingkungan yang merupakan tahap awal pembinaan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program

pembinaan. Kemudian pembinaan tahap lanjutan yang merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan yang diberikan didalam RUTAN. Pada tahap ini pengawasan sudah memasuki pada tahap Medium Security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan pada tahap ini pengawasan Narapidana memasuki tahap Minimum Security. Selanjutnya pembinaan tahap akhir yang berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) dan pembinaan dilakukan diluar RUTAN oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁶³

Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada Narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membangun karakter Narapidana yang terkait dengan pembinaan pribadi. Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberi bekal keterampilan kerja bagi Narapidana dalam mencari pekerjaan setelah selesai masa pidananya di dalam RUTAN.⁶⁴

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri para Narapidana supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa pidananya serta bisa bersikap dan berperilaku

⁶³Muh. Farid Saputra IK, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018.

⁶⁴I Wayan Nurasta Wibawa, Kepala RUTAN Klas IIB Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018.

sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan Kepribadian yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene yaitu⁶⁵ :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama dilakukan sesuai ajaran Islam karena semua Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene menganut agama Islam. Usaha ini diperlukan agar dapat meneguhkan iman para Narapidana terutama memberi pengertian agar Narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan Kesadaran Beragama meliputi :

- 1) Ceramah Agama
- 2) Shalat berjamaah (shalat wajib, shalat jumat dan shalat hari raya) di Masjid yang ada di Rutan Klas IIB Majene.
- 3) Tadarus Al-Quran.
- 4) Pelaksanaan dzikir dan doa bersama dalam memperingati hari-hari besar Islam

Kegiatan pembinaan Kesadaran Beragama baik yang dilaksanakan oleh Pegawai RUTAN, petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Majene ataupun oleh Narapidana sangatlah penting karena pada dasarnya setiap perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh kondisi mental dan nilai agamanya. Dengan kegiatan pembinaan Kesadaran Beragama tersebut diharapkan setiap Narapidana sadar akan kesalahan yang pernah dilakukan dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut.⁶⁶ Kegiatan Agama tersebut dimaksudkan :

⁶⁵Safwan, Pengelola Kepribadian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018.

⁶⁶Safwan, Pengelola Kepribadian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018.

- 1) Memupuk dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Narapidana
- 2) Kesehatan rohani/mental Narapidana
- 3) Menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai agama
- 4) Membuka pintu taubatnya akan kesalahan yang pernah dilakukan
- 5) Memberikan kejelasan antara nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kesalahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pengetahuan beragamanya.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan agar Narapidana dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah pelaksanaan upacara- upacara tertentu seperti Upacara 17 Agustus dan Upacara Pengibaran Bendera Hari Kesadaran Nasional serta karya bakti HUT TNI ke 73 Tahun di Taman Makam Pahlawan Pamboang, Kabupaten Majene.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Rutan Klas IIB Majene juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Narapidana untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuannya melalui sarana perpustakaan RUTAN, perpustakaan keliling, lapak baca yang diadakan seminggu sekali, mendengarkan radio, menonton televisi serta membaca majalah dan koran. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir Narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran

hukum yang tinggi sehingga kelak selesai menjalani masa pidana sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan di bidang ini merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar mantan Narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Dengan menerapkan sistem Pemasyarakatan pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene diarahkan pada tercapainya tujuan pembinaan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat melalui program :

1) Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Syarat pemberian Asimilasi yang diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan berkelakuan baik (tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurung waktu enam bulan terakhir), aktif melakukan program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Khusus untuk Narapidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan Kejahatan HAM yang berat serta Kejahatan Transnasional lainnya harus menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.⁶⁷

⁶⁷Muh. Farid Saputra IK, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018.

Asimilasi bagi Narapidana dengan masyarakat luar dilakukan dengan jalan kunjungan dari pihak keluarga dan lain-lain. Asimilasi yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene masih dalam taraf luar tembok RUTAN dengan pengawalan.

Bentuk Asimilasi tersebut meliputi :

- a) Bekerja sebagai tenaga kebersihan halaman luar depan kantor.
- b) Bekerja sebagai tukang cuci mobil.
- c) Membersihkan lingkungan sekitar seperti sungai, pasar dan lain-lain.
- d) Membantu masyarakat dalam membersihkan rumah yang terkena bencana kebakaran.

2) Pembebasan Bersyarat

Untuk menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara Narapidana dengan masyarakat serta untuk pencapaian tujuan pembinaan, maka Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene menerapkan program Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana yang memenuhi syarat baik substantif dan administratif.

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) Cuti

Selain menerapkan program Asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga menerapkan program Cuti. Seperti halnya program Asimilasi dan program Pembebasan Bersyarat, program Cuti ini juga sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan

penghidupan Narapidana dengan masyarakat. Program Cuti yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene antara lain :

- a) Cuti Bersyarat (CB)
- b) Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- c) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

f. Pembinaan Jasmani

Bentuk pembinaan Jasmani yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene antara lain permainan bola volly, bola takraw, tennis meja, dan bulu tangkis yang dilaksanakan setiap harinya. Olahraga ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan jasmani Narapidana.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya Narapidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari RUTAN Klas IIB Majene. Pembinaan Kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan bakat masing-masing Narapidana. Dalam hal ini, bagi Narapidana yang memiliki bakat tertentu akan diusahakan pengembangan bakatnya melalui program pembinaan Kemandirian.⁶⁸

Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene antara lain :

- a. Pembinaan Bagi Narapidana Pria

⁶⁸Yusrianto, Pengelola Kemandirian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018.

1) Pertukangan Kayu

Dengan memanfaatkan sarana pertukangan yang ada dan dengan memilih Narapidana yang punya latar belakang keahlian di bidang ini, hasil-hasil dari pertukangan kayu ini selain untuk kebutuhan kantor, juga menerima pesanan dari pegawai RUTAN dan dari pihak luar yang melakukan pemesanan. Produk dari pertukangan kayu tersebut adalah meja, kursi, rak TV dan lain-lain.

2) Kerajinan Bahan Baku Lidi

Dengan keahlian yang dimiliki Narapidana, kegiatan kerajinan bahan baku senantiasa berjalan dengan baik. Adapun hasil-hasilnya adalah:

- a) Pembuatan tutup saji dari yang berukuran besar kecil sampai dengan ukuran besar.
- b) Pembuatan keranjang
- c) Piring lidi (Rakki)
- d) Pembuatan hiasan dan lain-lain.

3) Kerajinan Tangan

Antara lain :

- a) Hiasan dinding
- b) Bingkai foto
- c) Kaligrafi
- d) Asbak rokok
- e) Hiasan meja
- f) Jam dinding
- g) Lampu tidur

Meskipun dengan alat yang sederhana, kualitas dan keunikan dari apa yang telah dibuat oleh Narapidana RUTAN Klas IIB Majene membuat warga di luar RUTAN ikut serta belajar/berlatih membuat dan memasarkan produk-produk Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

4) Pertanian

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene tidak memiliki lahan pertanian, namun halaman belakang dan bagian dalam kantor dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, meskipun hasilnya tidak seberapa namun para Narapidana sangat antusias untuk mengurusnya. Berapa cocok tanam yang pernah dilakukan diantaranya menanam cabe, lemon dan kacang panjang.

5) Budidaya Ikan Lele

Memanfaatkan keahlian Narapidana, RUTAN Klas IIB Majene juga melakukan budidaya ikan Lele. Kegiatan juga mengadakan kerjasama dengan Dinas Perikanan Majene untuk mendatangkan bibit ikan lele dari luar dan juga membantu memasarkan setelah dilakukan masa panen.

6) Cukur Rambut

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga mengadakan kegiatan rambut yang berada di depan kantor. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan Narapidana pada bidang ini.

7) Sablon

Untuk menunjang kegiatan para Narapidana dalam hal melakukan kegiatan, para Narapidana juga melakukan Sablon baju untuk memenuhi kebutuhan seragam Narapidana dan Tahanan yang ada di RUTAN Klas IIB Majene.

8) Cuci Mobil/Motor

Salah satu kegiatan Kemandirian yang diadakan adalah dengan melakukan pencucian Mobil/Motor yang berada di depan kantor RUTAN.

b. Pembinaan Bagi Narapidana Wanita

1) Keterampilan Menjahit

Bagi Narapidana wanita dilakukan kegiatan menjahit untuk menambah keterampilan mereka. Kegiatan ini biasanya disalurkan dalam bentuk membuat baju seragam narapidana atau membuat gorden.

2) Pembuatan Kerajinan Tangan

Pembuatan kerajinan tangan dilakukan narapidana wanita dibimbing langsung dari pengelola Kemandirian ataupun narasumber dari luar RUTAN. Kerajinan ini seperti bingkai, tutup saji yang kemudian hasil kerajinan tangan tersebut dipasarkan diluar RUTAN. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan para Narapidana.

3) Pembuatan Abon

Selain kerajinan tangan, produk lain yang dibuat adalah abon ikan. Produk ini juga dipasarkan diluar RUTAN dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan narapidana.

Dari hasil-hasil karya Narapidana RUTAN Klas IIB Majene selain untuk kebutuhan kantor, juga dilakukan penjualan guna menambah keuangan kantor untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Proses pemasaran dilakukan baik secara langsung ataupun melalui media online. Kemudian dana yang diterima melalui penjualan keterampilan tersebut akan dimasukkan di kas kantor, pajak untuk

negara 10%, diberikan kepada Pengelola Kemandirian dan juga diberikan kepada para Narapidana sebagai upah atau premi atas kerja yang telah dilakukan.⁶⁹

3. Pelaksanaan Kemitraan (Kerja Sama)

Menyadari bahwa pembinaan Narapidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen Narapidana, Petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan tersebut tujuan Sistem Pemasyarakatan melalui upaya integrasi Narapidana tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan sehingga dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan Narapidana. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui Program Kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene sebagai sarana kegiatan pembinaan adalah⁷⁰ :

- a. Untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku dilakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Majene berupa kegiatan Ceramah atau siraman rohani di hari-hari tertentu seperti hari jumat dan hari-hari Besar Agama Islam.

⁶⁹Yusrianto, Pengelola Kemandirian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018.

⁷⁰Muhammad Arham, Kepala Pelayanan Tahanan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018.

- b. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Majene.
- c. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerja sama dengan sanggar senam dalam melatih Narapidana.
- d. Untuk meningkatkan keterampilan kerja, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Majene khususnya pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Majene dalam memberikan pelatihan otomotif, las, kelistrikan dan pendingin seperti lemari es dan AC.
- e. Untuk memperlancar kegiatan budidaya ikan lele, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga melakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Majene untuk mendatangkan bibit ikan lele dan juga membantu memasarkan
- f. Dalam rangka meningkatkan minat baca para Narapidana, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerjasama dengan beberapa Penggiat Literasi guna melakukan kunjungan di Lapak Baca Antrabaz RUTAN Majene.
- g. Dalam melaksanakan program Pramuka, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerja sama dengan Pramuka Kwarcab Majene untuk melakukan latihan pramuka yang diadakan pada hari-hari tertentu.
- h. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga melaksanakan kerja sama dengan Polres Majene dalam menjaga ketertiban dan keamanan RUTAN.
- i. Dalam rangka pencegahan narkoba di RUTAN Klas IIB Majene dan pelaksanaan tes urine Narapidana dan seluruh pegawai RUTAN,

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

C. Pandangan Narapidana tentang Pembinaan

Narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Sebenarnya Narapidana harus dipidana dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan, tidak semestinya didalam RUTAN karena RUTAN hanya diperuntukkan bagi para Tahanan, baik Tahanan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tetapi karena tidak setiap Kota Kabupaten mempunyai LAPAS, maka sebagian Narapidana terpaksa dititipkan dan dibina didalam RUTAN.

Pengertian dari RUTAN dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan disidang Pengadilan”.⁷¹ Sedangkan pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.⁷² Karena tidak mempunyai LAPAS, Narapidana yang berada di Kabupten Majene kemudian ditempatkan didalam RUTAN untuk dilakukan pembinaan.

⁷¹Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dari tahun ke tahun terus berbenah diri membuat suasana lingkungan kantor RUTAN menjadi lebih bersih, indah, sejuk, tentram, aman dan damai dengan membuat taman-taman baik di depan kantor maupun didalam kantor, tulisan-tulisan bermakna filosof dan beberapa kegiatan-kegiatan pembinaan Narapidana sehingga terkesan nuansa pembinaan sangat baik.⁷³

Narapidana yang dijadikan narasumber dalam penelitiann ini beranggapan bahwa kegiatan dan pola pembinaan yang dilakukan pihak RUTAN sangat menarik dan mereka dengan terbuka menerima sepenuh hati pembinaan yang diberikan karena pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian dan keterampilan seperti membaca Al-Qur'an, membuat kerajinan, olahraga dan kegiatan pramuka. Selain itu sikap pegawai di dalam RUTAN juga sangat baik, terbuka kepada setiap Narapidana dan tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya.⁷⁴

Indra Didi Yudha, salah satu Narapidana bersyukur telah dibina di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene karena sebelum masuk didalam RUTAN, Narapidana yang bersangkutan kurang lancar mengaji. Setelah dilakukan pembinaan secara rutin, maka cara membaca Al-Qurannya bisa lebih baik. Selain pengajaran mengaji, tingkat pemahaman terhadap Agama juga bertambah. Dia mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.⁷⁵

⁷³Irham, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018.

⁷⁴Firdaus, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018.

⁷⁵Indra Didi Yudha, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018.

Dampak dari kegiatan pembinaan tersebut yaitu dapat merubah pola pikir mereka serta merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, mereka juga mendapatkan keterampilan tambahan yang bisa mereka gunakan setelah mereka keluar dari RUTAN. Diharapkan dengan adanya pembinaan didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dapat membentuk watak dan mental baru Narapidana agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah dilakukan dan bisa menghindari untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Ada tiga komponen penting dalam keberhasilan pembinaan yang dilakukan yaitu Narapidana, petugas dan masyarakat⁷⁶. Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada Narapidana itu sendiri, karena Narapidanalalah yang menentukan apakah dirinya mau menerima dengan senang hati pembinaan yang diberikan. Komponen selanjutnya adalah petugas yang memberikan pembinaan. Sikap yang baik dari petugas sangat dibutuhkan agar Narapidana mau mengikuti seluruh rangkaian pembinaan yang diberikan. Kemudian komponen yang menentukan keberhasilan pembinaan adalah masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam pembinaan dikarenakan tujuan utama dari pembinaan pemasyarakatan adalah memasyarakatkan Narapidana, artinya dengan pembinaan ini diharapkan nantinya Narapidana saat selesai menjalani pidananya dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Setelah penulis melakukan wawancara beberapa warga sekitar RUTAN Klas IIB Majene, masyarakat disana sangat mengapresiasi pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN Klas IIB Majene karena pembinaan yang diberikan selain membina Narapidana didalam RUTAN juga Narapidana sering melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar seperti bergotong-royong

⁷⁶Muhammad Arham, Kepala Pelayanan Tahanan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018.

membersihkan pasar, sungai bahkan membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang terkena musibah kebakaran. Selain kegiatan membersihkan, Narapidana RUTAN Klas IIB Majene juga membantu mengantarkan pupuk kandang ketempat pertanian warga dan membantu pembangunan WC umum bagi masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, warga tidak menganggap lagi Narapidana sebagai orang-orang jahat yang terasingkan didalam penjara. Dan warga pun akan menerima keberadaan mantan Narapidana sebagai bagian dari lapisan masyarakat karena menganggap pembinaan yang diberikan sudah bisa memberikan perubahan yang baik bagi Narapidana.⁷⁷

Akibat dari perkembangan ilmu kriminologi maka paradigma penjara sebagai alat untuk menjerakan Narapidana, sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesadaran bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelemahan sistem dalam masyarakat. Menurut paradigma ini, kejahatan mulai dipandang sebagai masalah struktural dan bukan hanya semata-mata sebagai masalah individual. Bahwa jera tidak akan tumbuh melalui penyiksaan melainkan melalui bimbingan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberantas kejahatan bukanlah dengan cara mengeliminasi penjahatnya akan tetapi memperbaiki perilaku jahatnya. Pelaku kejahatan lebih dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia selaku makhluk Tuhan, selaku pribadi dengan berbagai kecenderungannya dan selaku makhluk sosial serta selaku manusia sebagai warga negara yang tidak dicabut hak-hak konstitusionalnya.⁷⁸

⁷⁷Abd. Latif, Warga Lingkungan Saleppa, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Lingkungan Saleppa, 15 September 2018.

⁷⁸Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan, 2007, h. 200

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang diterapkan adalah pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan jasmani. Sedangkan pembinaan Kemandirian meliputi pertukangan kayu, kerajinan tangan, pertanian, perikanan, cukur rambut, sablon, cuci mobil/motor, keterampilan menjahit, dan pembuatan abon. Dan untuk memaksimalkan pembinaan Narapidana, RUTAN Klas IIB Majene mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi baik perorangan maupun kelompok demi tercapainya tujuan pembinaan. Pembinaan yang diberikan juga selaras dengan pendapat beberapa ulama yang mengharuskan adanya pembinaan bagi para Narapidana untuk memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.
2. Pandangan Narapidana terhadap pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bahwa kegiatan dan pola pembinaan

yang dilakukan pihak RUTAN sangat baik dan menarik karena pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian dan keterampilan kerja. Pembinaan yang diberikan antara lain membaca Al-Quran, membuat kerajinan tangan, olahraga dan kegiatan pramuka. Selain itu sikap pegawai RUTAN juga sangat baik, terbuka kepada setiap Narapidana dan tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberi dukungan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada baik dari sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan lebih maksimal.
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Majene mengingat semakin meningkatnya angka kejahatan di wilayah Kabupaten Majene, diharapkan dapat memberikan lahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru dikarenakan RUTAN Klas IIB Majene sudah over kapasitas. Dan seharusnya Narapidana dibina dalam LAPAS agar lebih efektif pembinaan yang dilakukan.
3. Selanjutnya penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada mantan Narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan memberikan kesempatan bagi mantan Narapidana untuk menunjukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Inilah tugas bagi semua orang bukan hanya pihak RUTAN untuk menyakinkan masyarakat agar dapat terbuka menerima kembali Narapidana kedalam lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Gunawan, Iwan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah*. Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan - Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2014.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Depok: Sabiq, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 35; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan HAM – Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 3; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1981.

- Sudirman, Didin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta Selatan, 2007.
- Sulhin, Iqraq. *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zulha, Eva Achjani, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

WEBSITE

- <http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-mini-bookmark&oq=Pengertian+Hukum+Islam+dan+Sum&aqs=mobile-gws-lite.0.015&q=pengertian+hukum+islam+dan+sumber+hukum+islam>
- <http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-islam.html?m=1>
- <http://isikepalakachfi.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html?m=1>

L

A

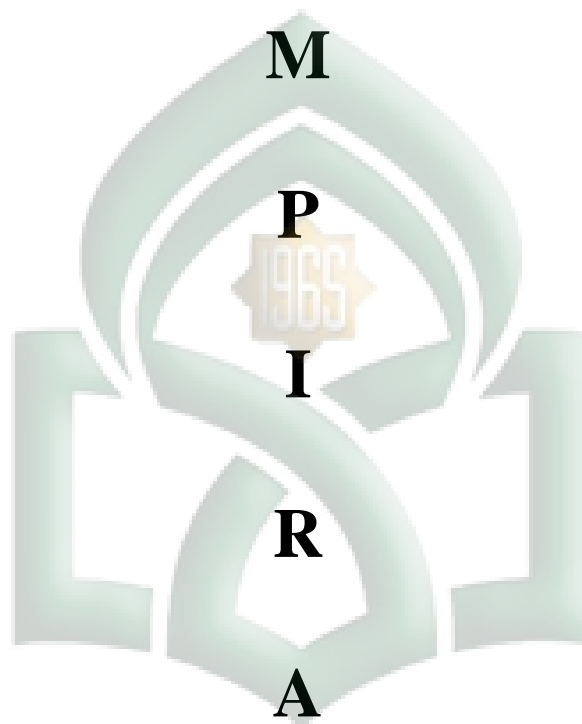
M

P

I

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pegawai Rutan :

1. Bagaimana Perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana?
2. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh RUTAN Klas IIB Majene terhadap Narapidana?
3. Bagaimana respon Narapidana terhadap pelaksanaan pembinaan?
4. Bagaimana tahapan pembinaan Narapidana?
5. Bagaimana pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain?
6. Bagaimana jika Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu selama proses pembinaan?
7. Bagaimana mengoptimalkan pembinaan Narapidana?
8. Apakah dalam melakukan pembinaan dilakukan kerjasama dengan pihak atau instansi dari luar?
9. Bentuk kerjasama apa yang biasa dilakukan?
10. Apa tujuan dari pembinaan Narapidana?
11. Apakah ada perbedaan dalam proses pembinaan di RUTAN dan di LAPAS?
12. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki RUTAN Klas IIB Majene?
13. Apa saja kendala yang dialami saat melakukan pembinaan?
14. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
15. Bagaimana kronologi sehingga salah satu Narapidana melarikan diri?

Pertanyaan untuk Narapidana :

1. Sudah berapa lama Saudara menjalani masa pembinaan?
2. Apa saja jenis-jenis pembinaan yang diberikan oleh pihak RUTAN?
3. Bagaimana pola pembinaan di RUTAN menurut Saudara?
4. Apakah saudara tertarik mengikuti pola pembinaan yang diberikan oleh petugas? Apa alasannya?
5. Apakah saudara bersungguh-sungguh mengikuti pola pembinaan yang diberikan?
6. Apakah dalam mengikuti pembinaan Saudara mendapatkan masalah?
7. Apakah ada perubahan setelah mengikuti kegiatan pembinaan?
8. Bagaimana menurut Saudara tentang perlakuan petugas selama mengikuti pembinaan?
9. Apa saja kekurangan RUTAN Klas IIB Majene dalam melakukan pembinaan?
10. Apa kesan yang Saudara dapatkan selama menjalani masa pembinaan?

Pertanyaan untuk Masyarakat :

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan pihak RUTAN?
2. Bagaimana menurut Saudara terhadap kegiatan-kegiatan pihak RUTAN?
3. Apakah kegiatan tersebut berdampak pada masyarakat?
4. Menurut Saudara, apakah tindakan RUTAN sudah baik guna memberikan pembinaan terhadap Narapidana?
5. Saat seorang Narapidana telah bebas, apakah masyarakat akan bisa menerima keberadaan Narapidana atau mereka akan tetap dianggap sebagai penjahat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



KEGIATAN NARAPIDANA



HASIL KARYA NARAPIDANA





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MAJENE
JL. ANDI TONRA NO. 13 MAJENE
☎ (0422) 21016-21059

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W33.PAS3.UM.01.01-8842018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Subseksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dharmawangsa
NIM : 10200114105
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Telah mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene dari tanggal 23 Juli 2018 s/d 21 September 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : “
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS II B MAJENE”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 26 September 2018

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas II B Majene

I Wayan Nurasta Wibawa, A.Md.IP,S.Sos,M.Si

NIP. 19800405 200012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 38 Sarfata Sungguminasa Gowa
Tlp. (0411) 424835 Fax. 424836

Nomor : B- /SH.01/PP.00.9/07/2018

Samata, Juli 2018

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak Kepala Rutan Klas II B Majene
di
Majene

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dharmawangsa
Nim : 10200114105
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Bumi Zarindah Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Usman, MA
2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. H. I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju terhitung mulai tanggal 23 Juli s/d 21 September 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1529/MPK/2018

**Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.**

Gowa, 11 Juli 2018

Penyusun



Dharmawangsa

Nim. 10200114105

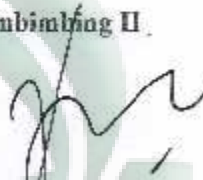
Pembimbing I



Prof. Dr. Usman, MA

Nip. 19580901 199102 1 001

Pembimbing II

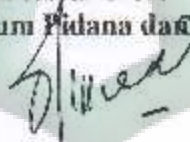


Dr. Karniati, S.Ag, M.Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

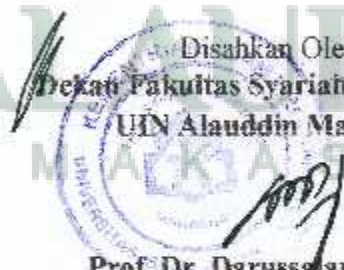


Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip. 19621016 199003 1 003

FORMULIR
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Nama : Dharmawangsa
2. NIM : 10200114105
3. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan pemasyarakatan menurut PP No. 32 Tahun 1999 jo. PP No. 28 Tahun 2006 jo. PP No. 99 Tahun 2012.
4. Rencana Seminar Proposal
- a. Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
- b. Waktu : 11:00 WITA
- c. Tempat : Ruang Jurusan Hpk

Samata,

2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Usman, M. Ag

NIP. 19580901 199102 1 001

Pembimbing II

Dr. Kurnianti, S. Ag, M. H

NIP. 19740627 200604 2 002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dra. Nila Sastrawati, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

*) Bagi Mahasiswa yang akan seminar proposal, harus menyerahkan formulir ini 3 hari kerja sebelum hari seminar.

Hal : Permohonan Judul Skripsi
Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dharmawangsa
NIM : 10200114105
Semester/Klpk : VII/C
Angkatan : 2014

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Peranan BPD Sebagai Badan Legislatif Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014.
3. Perbandingan KUI Pidana Dengan UU Penghapusan KDRT Dalam Menjatuhkan
- X Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. *judul sudah ada*

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Samata, 23 September 2017

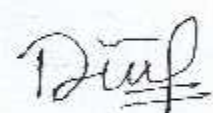
Mengetahui,

Pemohon

Penasehat akademik


Dra. Hj. Halimah B., M.Ag

NIP : 19581025 199603 2001



Dharmawangsa

NIM : 10200114105

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 2769 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

: Surat Permohonan

Nama : Dharmawangsa
N I M : 10200114105
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene"

Menimbang

- : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa meraka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

*Menetapkan
Pertama*

: Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.
Penguji II : Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.
Pelaksana : 1. Mujahidan, S.E.
 2. Muh. Amzar, S.Ag

Kedua

: Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

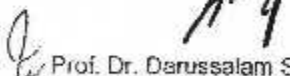
Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal 19 Oktober 2018

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-5376/SH.O1/PP.00.9/10/2018
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, 19 Oktober 2018

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Sekretaris)
3. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. (Penguji I)
4. Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. (Penguji II)
5. Prof. Dr. Usman, M.Ag. (Pembimbing I)
6. Dr. Kurniati, M.H.I. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Dharmawangsa
NIM : 10200114105
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Waktu : Pukul 10.00-11.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa,

RIWAYAT HIDUP



Dharmawangsa, anak terakhir dari 3 bersaudara adalah anak kandung dari pasangan Muh. Arif dan Rustia. Lahir di Majene, 20 Januari 1996. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 39 Manyamba sejak usia 6 Tahun (lulus pada tahun 2008), melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sendana (lulus pada tahun 2011), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sendana (lulus pada tahun 2014) dan selanjutnya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Beralamat di Dusun Karema, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Dengan rahmat Allah SWT serta dukungan dan doa dari keluarga dan teman-teman, penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang begitu mendalam kepada segala pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”**.